

PERANAN POLITIK DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

SALASIAH

DOSEN FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ABSTRACT

The aim of this research is to know about the role of the politics towards the good governance. The background of it is that the state officer has not executed the good governance well in serving the public. The theory of the good governance shows the behaviours namely : cooperative, participative, transparent, accountable, and reliable. The method of the research is library one by finding-out data from the mass-media. The results of the research are that the most of the state officers are not carrying out the principles of good governance. The suggestions of the researcher are (1). To have the good examples of the elites (2). The supervisor has to work hard to control (3). To give punishment and rewards as well to the staff..

Keywords : accountable, governance , reliable transparent .

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik berarti juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Politisi adalah orang yang bergiat dalam kancah politik dari kata bahasa Inggris politician sedangkan ilmunya disebut politics. Bila ada masalah yang dipolitisi maka menjadi kata kerja politicize. Namun demikian bahwa politik dapat mengintervensi segala bidang yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah keuntungan sepihak lalu muaranya kedudukan, targetnya ekonomi dan wujudnya uang. Di Indonesia menganut paham trias politika yaitu pemisahan 3 (tiga) kekuasaan yaitu legislatif (parlemen/DPR), eksekutif (pemerintahan) dan yudikatif (kehakiman). Sebagai pengetahuan bahwa kekuasaan legislatif di pusat disebut DPR RI, di Provinsi disebut DPRD Provinsi dan di Kota/Kabupaten disebut DPRD KOTA/KABUPATEN. Sedangkan kekuasaan eksekutif di pusat disebut Pemerintah Pusat yaitu Presiden/Wakil Presiden dan staf menteri di provinsi disebut Pemerintah Provinsi dan di kota / kabupaten disebut Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten. Kemudian kekuasaan legislatif yang dipusat adalah Mahkamah Agung untuk menangani semua perkara dari pengadilan tinggi (umum, agama dan militer) yang kasasi, Kejaksaan Agung menangani masalah hukum yang dianggap memiliki skala besar dan Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara pemilihan umum (Legeslatif, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah) dan uji materiil undang-undang. Di pusat juga dibentuk komisi-komisi seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi HAM dan lain-lain yang semuanya itu ingin berupaya penegakan hukum dan keadilan dan mengacu pada amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Thoha (2002:92 – 94) bahwa sistem kepartaian dimulai di Amerika Serikat sekitar abad 19 mulai dikenal sistem pemilihan dan parlementaria. Kemudian berkembang terus sampai abad ke 20 dan hingga kini. Sistem ini dianggap baik maka didukung oleh massa rakyat. Sistem kepartaian tergantung juga ideologi Negara tersebut. Di sini ada beberapa ideologi yaitu liberalis, kapitalis, sosialis, komunis, campuran dan agama Islam. Di negara liberalis yang umumnya Negara Barat yang maju atau negara Industri yang mempunyai 2 (dua) partai politik misalnya Inggris partai Konservatif dan Liberal, di Australia memiliki partai buruh dan partai konservatif. Di negara Sosialis memiliki 1 (satu) partai yang dominan yaitu partai sosialis sedangkan di negara berfahaman komunis yaitu bentuk ekstrim dari sosialis memiliki partai tunggal yaitu partai Komunis yang sangat menentukan apapun namanya yang beraliran komunis. Di negara campuran menganut ideologi liberalis dan sosialis. Di sana ada istilah berbagi kasih artinya yang kaya membantu yang miskin namun berbggi ini belum berjalan sebggi mana yang diharapkan. Di negara –negara ini memiliki banyak partai atau multi partai. Negara–negara ini umumnya miskin yang disebut dengan negara berkembang dan negara terbelakang. Misalnya

Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh, India dan banyak negara lain seperti di benua Afrika. Dengan banyaknya jumlah partai timbul pula banyak persoalan yang muncul dalam urusan perebutan kekuasaan sehingga suhu politik terus memanas yang mengakibatkan ekonomi melemah dan nyaris bangkrut. Di negara yang menggunakan sistem campuran misalnya di negara yang ada mayoritas pemeluk agama misalnya Islam memiliki multi partai menghimbau kepada warganya untuk berbagi melewati zakat, wakaf, sodaqoh, infaq dan sejenisnya untuk membantu sesama.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian selalu mengacu pada suatu masalah yang akan dipecahkan. Masalah adalah sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang menghambat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah **apakah peranan politik dalam pemerintahan yang baik ?**

C. Tujuan Penelitian

Sesuatu kegiatan administrasi pasti ada tujuannya. Dalam kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan politik dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu administrasi negara dan menjadi acuan kepada para peneliti yang akan datang yang ingin meneliti lebih dalam tentang pemerintahan yang baik atau Good Governance. Manfaat secara praktis adalah sebagai masukan bagi para penyelenggara negara agar benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance

II. METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu (1). Mengambil data dari literatur untuk mencari kerangka dasar teori tentang politik dan pemerintahan (2). Mengambil data dari mass-media baik cetak seperti surat kabar, majalah, edaran, terbitan dan selebaran maupun elektronik yaitu dari radio, televisi, internet, website dan sejenisnya.

III. KERANGKA DASAR TEORI

A. Politik sebagai Independent Variable

Politik artinya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika ia belum mendapatkan kedudukan atau kekuasaan agar mendapatkan kewenangan maka ia akan merebut dengan segala cara, misalnya : kampanye, menyuap, memaksa, membunuh, menyakiti dan sejenisnya dari yang ringan sampai dengan yang sadis dan dari yang rohani sampai jasmani. Bagi yang sudah berkuasa ia akan mempertahankannya dengan hal-hal positif, terpuji dan mulia misalnya : berbuat baik buat rakyat dengan pemerintahan pro rakyat misalnya : demokratis, memperbaiki infrastruktur, cukup pangan, cukup sandang dan cukup papan, turun ke daerah untuk menyerap aspirasi ke wilayah pinggiran yang kumuh, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mempermudah pelayanan, dekat dengan rakyat, menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bedah rumah yang kumuh, peduli lingkungan dan langkah lain yang sejenis itu. Tetapi ada juga yang negatif yaitu berpegangan aji mumpung artinya berpegang pada legalitas yakni ia sedang memegang kekuasaan ia akan bertindak semaunya, misalnya menggunakan anggaran yang tidak pas dengan berlindung pada undang-undang dengan melakukan korupsi berselubung, jual beli perizinan, jauh dengan rakyat, susah ditemui, menyuburkan kelusi, korupsi, nepotisme dan sejenisnya. Sebenarnya Pemerintah Indonesia ini telah menindak dengan keras para koruptor tetapi masih banyak para pejabat korup belum tersentuh. Mereka sangat rapi, santun, senyap dan sulit dilacak misalnya :

- a. Menyewakan rumah sendiri ke pemerintah untuk kantor pemerintah
- b. Pembiayaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan durasi
- c. Membentuk perusahaan atas nama keluarga atau handai taulan dan atau kroninya sebagai bentuk monopoli.
- d. Memonopoli suatu bisnis atau kegiatan yang muaranya ke saudara-saudaranya.

Kata politik adalah kata yang sangat berwibawa dan bergengsi karena lewat politik bila lancar dan bernasib baik maka orang dapat menjadi penguasa atau sebaliknya bila salah langkah ia menjadi buronan lalu dipidanakan. Sekali lagi kalau bejo ia akan lancar untuk menjadi penguasa. Seseorang yang masuk menjadi anggota partai politik disebut orang itu berpolitik praktis yang ujung-ujungnya untuk maju sebagai calon

legislator dan atau pejabat publik. Tetapi ada juga politik dalam arti positif adalah keputusan kolektif untuk orang banyak (Mitchel, 1969:4-5) dalam Dadang (2007:493) dengan cara mengabdikan kepada masyarakat lewat strategi yang pro rakyat. Dalam arti positif maka politik akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hubungan pemerintah dengan rakyat kompak bersatu padu membangun daerahnya
- b. Aparatur pemerintah dekat dengan kebijakan pro-rakyat
- c. Lingkungan terjaga baik
- d. Tidak pernah ada kasus penyelewengan
- e. Kolusi, korupsi dan nepotisme tidak mendapat tempat
- f. Rakyat kritis akan kebijakan pemerintah

Sedangkan politik dalam arti negatif adalah merebut dan menganggangi kekuasaan sehingga dalam politik praktis akan terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekuasaan adalah tujuannya
- b. Ia tega membunuh lawan-lawannya
- c. Ia tega membunuh karakter lawan
- d. Ia tega memfitnah lawan
- e. Ia menggunakan segala cara atau menghalalkan segala cara.
- f. Pemerintah menghalalkan segala cara untuk memperkuat kekuasaan

Politik menentukan apa saja dan siapa saja dalam bernegara dan berbangsa. Segala keputusan dengan cara konstitusional yaitu bersama Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya :

- a. Harga kebutuhan pokok sembako

Kenaikan harga kebutuhan pokok sembako terus dipantau baik oleh DPR maupun Pemerintah misalnya harga beras, kedelai, daging, sayur mayur dan sejenisnya. Penentuan harga (HET) melalui sidang antara DPR dan pemerintah.

- b. Harga energi

Harga energi seperti minyak dan gas selalu dibahas secara politis antara pemerintah dan DPR. Akhir-akhir ini ada kenaikan BBM yang membuat geger rakyat maka pemerintah dan DPR turun tangan sedangkan kehakiman mengawasi pelaksanaannya. Dengan hasil rundingan aparaturnya Negara tersebut maka gas harga turun menjadi 110 ribu dari 150 ribu per tabung 12 kg.

B. Pemerintahan sebagai dependent variable

Akan halnya pengertian pemerintahan itu sendiri, berikut ini akan disampaikan berbagai pendefinisian tentang pemerintahan dan ilmu pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut **D.G.A. Van Poelje** (1953 : 1)

De Bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inrichten leidt. Maksudnya ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

2. Menurut **U. Rosenthal** (1978 :17)

De Bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interne en externe werking van de structuren en processen. Maksudnya ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

3. Menurut **H. A. Brasz** (1975 : 1)

De Bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare diens is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers. Maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

4. Menurut **W.S. Sayre** (19:)

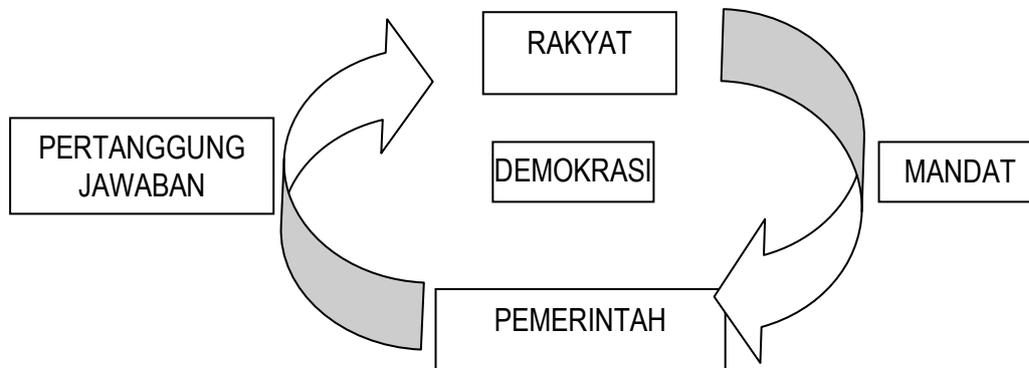
Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

5. Menurut **C.F. Strong** (1960 :6)

Government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state's behalf. Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu yang pertama pemerintah harus mempunyai kekuatan militer atau

- kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.
6. Menurut **Robert Mac Iver** (1960 : 5)
Government is the organization of men under authority... how man can be governed .Maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi **Mac Iver** Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how man are governed*).
 7. Menurut **Woodrow Wilson** (1924 : 9)
Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with referenceto the common affairsor the community.Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan sekelompok.
 8. Menurut **David Apter** (1977 : 10)
Government is most generalized membership unit prossessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power.Maksudnya pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
 9. Menurut **Taliziduhu Ndraha** (2002 : 10)
 Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
 10. Menurut **Charles Merriam** (1960 : 11)
 Tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare, dan freedom*.Maksudnya pemerintah meliputi keamanan menghadapi ancaman dari luar , ketertiban dalam negeri ,keadilan , kesejahteraan umum dan kebebasan.
 11. Menurut **Samuel Edward Finer** (1974 : 3-4)
 Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method ond system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.
 12. Menurut **Musanef** (1985 : 7)
 Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.
 13. Menurut **Soemendar** (1985 : 1)
 Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.
 14. Menurut **Bayu Suryaningrat** (1985 : 1)
 Disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.
 15. Menurut **BintoroTjokroamidjojo**
 Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal, di antaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu.
 16. Menurut **Prajudi Atmosudirdjo** (1984 : 19)
 Tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan.
- Dari keseluruhan definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan

sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

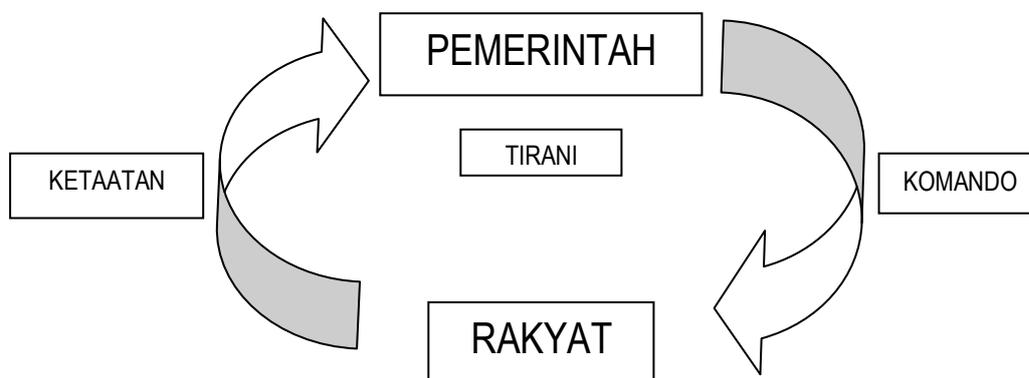


Gambar 1: Hubungan Vertikal Pemerintahan Bentuk Demokrasi
 Sumber :Kencana (2005) Dimodifikasi dari Taliziduhu Ndraha

Dalam Gambar 1 Hubungan Vertikal Pemerintahan Bentuk Demokrasi tersebut tampak bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan berada di atas, baik dalam bentuk demokrasi langsung maupun dalam bentuk demokrasi tidak langsung yaitu perwakilan (lembaga legislatif). Rakyat lalu memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama waktu yang ditentukan bersama. Bentuk pertanggungjawaban itu dapat dinyatakan antara lain sebagai berikut.

- *Accountability Speech* yaitu pidato pertanggungjawaban di hadapan parlemen (baik legislatif maupun konstitutif tergantung konstitusi yang dibuat).
- *Innougural Speech* yaitu pidato menjelang memulai pelaksanaan roda pemerintahan, setelah dilantik pemerintah perlu menyampaikan pidato permulaan menyampaikan visi dan misi ke depan,
- *Impeachment* yaitu apabila figur pemerintah memiliki kesalahan pribadi maka yang bersangkutan secara pribadi dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan anggota kabinetnya.

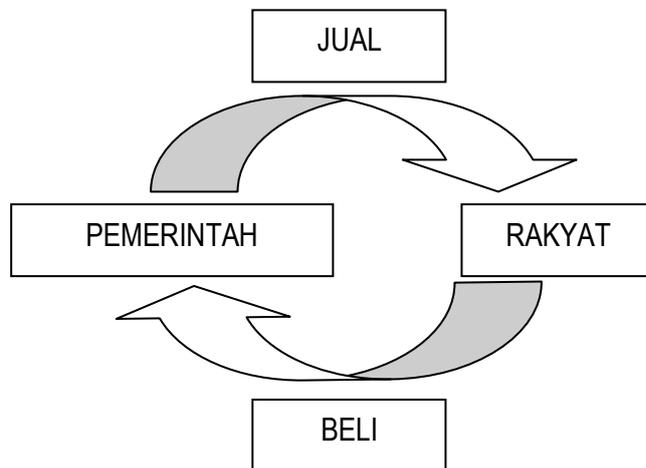
Selanjutnya bentuk otokrasi akan penulis suguhkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Hubungan Vertikal Pemerintahan Bentuk Otokrasi
 Sumber :Kencana (2005) Dimodifikasi dari Taliziduhu Ndraha

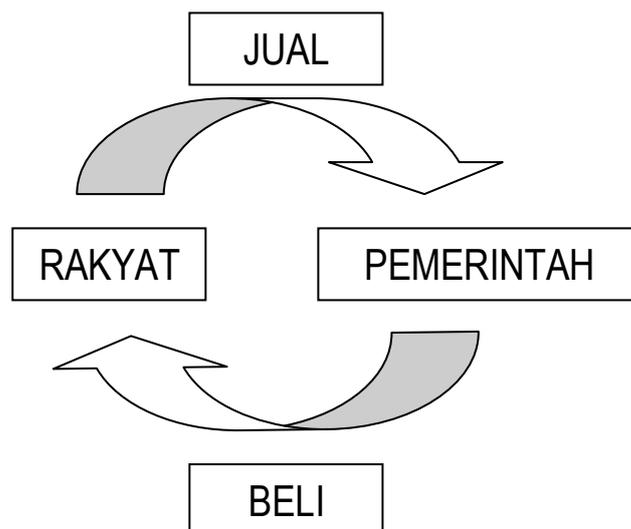
Dalam gambar Hubungan Vertikal Pemerintahan Bentuk Otokrasi di atas tampak bahwa pemerintah memberikan komando-komandonya secara satu arah (*one way traffic*) tanpa kompromi, dan rakyat dengan serta-merta menurut (*sami'na wo ata'na* artinya saya dengar dan saya taat). Tetapi hal ini sebenarnya tidak benar karena rakyat yang mampu menolak perintah penguasa yang dzalim merupakan jihad yang terbesar, hanya saja siapa berani melawan arus.

Selain hubungan vertikal di atas ada pula hubungan horizontal di mana rakyat dan pemerintah diletakkan sejajar, gambar di bawah ini akan memperjelas keterangan.



Gambar 3. Hubungan Horizontal Pemerintahan Bentuk Komunis
 Sumber :Kencana (2005) Dimodifikasi dari Taliziduhu Ndraha

Dari Gambar 3 Hubungan Horizontal Pemerintahan Bentuk Komunis tersebut, tampak bahwa semua barang produksi dikuasai oleh negara, perusahaan swasta tidak ada, bahkan partai tunggal hanya ada partai komunis yang berkuasa penuh, sehingga walaupun rakyat tidak membayar uang sekolah namun barang harus dibeli kepada pemerintah sebagai monopoli tunggal.



Gambar 4. Hubungan Horizontal Pemerintahan Bentuk Jepang
 Sumber : Dimodifikasi dari Taliziduhu Ndraha

Tata Kepemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.

Pengertian *governance* yang dikemukakan UNDP ini didukung tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi. *Pilar pertama* yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama politisi. *Pilar kedua*, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sedangkan *Pilar ketiga* yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi, adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (1997) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*. LAN menegaskan dilihat dari *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, *Pertama* orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan *Kedua* aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut LAN menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat madani.

Sebagai pemimpin yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Governance* mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Menurut UNDP, *governance* atau tata pemerintahan sebelum perdagangan bebas memiliki tiga domain yaitu : (a) Negara atau tata pemerintahan (*state*), (b) Sektor swasta atau dunia usaha dan (*private sector*)(c) Masyarakat (*society*). Sedangkan setelah perdagangan bebas domainnya di tambah dua lagi yaitu (d) Akademi sebagai fasilitator atau penghubung (e) Pihak luar negeripun sudah harus ikut baik.

Ketiga atau kelima domain dalam *Governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecipung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan pihak masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari pihak pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya dan lain lain.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah.

Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik

UNDP menganggap bahwa *good governance* dapat diukur dan dibangun dari indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (Stateholders) (2) Transparan dan bertanggung jawab (3) Efektif, efisien dan adil (4) Menjamin adanya supremasi hukum (5) Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat, (6) Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah .

Asas pemerintahan yang baik hanya lima prinsip utama yang akan diartikan dalam *good public governance* sebagai berikut : (a) Akuntabilitas (*accountability*), ialah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, (b) Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*), (c) Ketaatan pada aturan hukum, (d) Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi, (e)

Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

IV. PEMBAHASAN

Pada orde reformasi terjadi lagi multi partai pada pemilu tahun sampai saat ini. Bedanya saat partai politik dikurangi jumlahnya dengan batas elektika (elektical threshold 2 %) sehingga hanya 12 (dua belas) partai ditambah 1 (satu) partai Nasdem yang lulus dari seleksi sayarat partai.

Apapun bentuk negara, ideology Negara dan sistem pemerintahannya partai politik tetap menjadi instrumen yang amat penting. Seperti yang dikatakan oleh Thoha (2002 : 95), "**Baik dalam pemerintahan suatu negara yang konservatif atau yang revolusioner atau apakah dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang didukung oleh masa atau oleh suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau dictator monolitis maka suatu partai politik dibentuk tidak lain kecuali untuk menjalankan kekuasaan politik.**" Fungsi ini dilakukan oleh partai politik untuk merebut kekuasaan. Akibat dari fungsi tersebut maka biaya politik sangat tinggi. Misalnya saat ini para calon legislator (caleg), calon DPD, calon walikota/wakil walikota, Bupati/Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Presiden dan Wakil Presiden malahan sekarang tertular bagi mereka ingin menjadi pejabat di partai atau jabatan publik (walupun diam-diam) harus mengeluarkan uang untuk kampanye, alat peraga, kontribusi kepada partai dan konstituen.

A. Kampanye

Kampanye dari Bahasa Inggris campaign yang esensinya adalah kegiatan menawarkan untuk menjadi pemilih untuk memilih yang melakukan kampanye dengan mengumpulkan orang banyak. Perhelatan ini sangat mahal yaitu untuk akomodasi para vote getter seperti penyanyi, pelawak, ustadz dan orator. Para votegetter tersebut seperti Dewan Pengurus Pusat Partai memerlukan hotel VIP atau VVIP seperti untuk Pengurus Partai dari Jakarta, artis ibukota berkelas Inul, Tukul, Khridayanti, Grup Band Wali, Dedi Kempot dan sekelas itu. Lalu kedatangan para ustadz kesohor seperti Ustadz Mansyur, Ustadz Solmed dan lain-lainnya. Juga orator ulung atau master of seremony seperti : Koes Hendratmo, Helmi Zahya dan lain-lain. dengan pembiayaan yang cukup tinggi untuk honor atau uang lelah, konsumsi, transportasi, pengawalan, seragam, dan entertainment lainnya.

B. Alat Peraga

Alat peraga atau Algaka yang berwujud baliho, kartu, bendera, dan tanda lain. Harga baliho yang besar berharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) per biji sehingga bila membuat banyak misalnya 500 (lima ratus) biji maka akan mencapai 15 (lima belas) milyar rupiah belum lagi biaya izin, lokasi dan kendaraan. Anda dapat membayangkan berapa biaya Amin Rais, "Amin Rais for presiden" waktu itu (2004) yang ditempelkan di badan pesawat. Lalu berapa biaya sewa promosi di koran Dahlan Iskan, dan calon lain di surat kabar Nasional ataupun lokal? Berapa biaya calon legeslaltif kota, kabupaten dan pusat dan calon DPD yang menempelkam gakanya di bis, angkot dan angkutan desa.

C. Kontribusi kepada Partai

Kontribusi kepada partai amat banyak misalnya membantu partai untuk membuat bendera, konsumsi, transportasi, uang lelah, kantor partai, dan operasional partai. Jumlah bendera dan perlengkapannya serta pemasangannya memerlukan biaya tinggi anggaplah bendera sejumlah 1 juta ukuran sedang bendera dengan harga Rp. 10.000,00 maka biaya bendera tersebut menjadi 100 milyar rupiah.

D. Kontribusi ke konstituen

Uang ini disebut biaya transport dan konsumsi dimana kostiruen umumnya orang ekonomi sedang dan lemah. Biaya ini amat membengkak dalam waktu kampanye dan pada hari H pencoblosan ada usaha serangan wajar baik langsung dan tidak langsung, jelas atau tersembunyi. Andaikata dalam pengumpulan massa 2.000 orang maka harus menyiapkan air mineral 2.000 gelas, nasi 2.000 kotak dan sebagainya. Ada juga berbentuk lain seperti perbaikan tempat ibadah, perbaikan jalan, pemberian natura (bersa, indomie, sembako).

E. Akibat biaya politik

Akibat biaya politik adalah penggalan dana yang luar biasa besar apalagi pemilu dilaksanakan dengan langsung, umum, bersih dan rahasia (luber). Kontituen di sini adalah pemilih yang menjadi sumber suara yang belaku 1 (satu) orang berhak 1 (satu) suara atau *one man one vote* sehingga satu orang yang bergelar atau menjabat suatu jabatan apabila ia memiliki hak pilih berupa kartu pemilih atau KTP. Oleh karena itu

para calon legislatif, calon DPD, calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Wali Kota/ Wakil wali Kota dan Calon Bupati/Wakil bupati harus berhati-hati untuk memilih pemilih agar pemilih memang memiliki hak suara bila tidak maka para calon akan mendapatkan pepesan kosong pada hal mereka telah mengeluarkan uang banyak. Soal sumber dana para calon pejabat politik di atas memperoleh dari kekayaan pribadi, bantuan sponsor dan pinjaman.

1. **Bagi Inkomben**

Para inkomben lebih mudah memperolehnya dengan cara mengadakan kegiatan yang dibungkus kegiatan rutin yang ujung-ujungnya menguras uang negara dari dinasnyanya. Oleh karena itu mereka yang demikian lalu dituduh yang negatif yaitu menyalahgunakan jabatan. Kemudian bagi mereka juga dapat memanfaatkan kewenangan perijinan seperti ijin investasi di segala bidang usaha seperti tambang, sawit, mall dan lain-lain. Kejadian tersebut juga mereka dituduh sebagai menyalahgunakan jabatan. Lalu pengerahan massa seperti bupati, walikota, camat, lurah dan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW). Ini juga menjadi bahan tuduhan pengerahan massa yang masif dan sistematis. Pengalaman yang lalu bahwa para penggugat yang mempersoalkan penyalahgunaan ini umumnya kandas karena barang bukti tidak kuat. Namun demikian bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang sebagai inkomben akan menghadapi masalah setelah memenangkan peraturan yaitu tagihan atau tuntutan dari pegawai di wilayahnya, pengusaha dan pemilih. Tagihan itu adalah :

- a. Dari pegawai adalah tuntutan jabatan eselon dan kesejahteraan pegawai.
- b. Dari pengusaha adalah minta proyek, wilayah tambang, wilayah perkebunan.
- c. Dari konstituen adalah minta bantuan segala macam kebutuhan.

Hal-hal di atas umumnya terus bergolak bagi pemenang pemilu dan terus digoyang maka tergantung teknik melawannya atau menyelesaikannya. Apabila kurang tepat penyelesaiannya maka pemenang tersebut akan dilaporkan terkait soal korupsi misalnya atau gugatan lewat PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Namun umumnya pemenang tetap menang karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final. Perkecualian pemenang gagal adalah karena ketangkasan basah menyuap maka baik yang menyuap dan yang disuap akan tersangka dan batal menjadi pemenang. Contohnya kasus di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Kabupaten Lebak di Banten dan masih banyak lagi yang sekarang terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah lain.

2. **Bagi inkomben dan didukung rakyat**

Yang lebih mulus adalah para calon yang didukung rakyat karena komunikasi yang bagus, kinerja yang berhasil, merakyat dan sebagainya sebagai contoh Dr. Awang Faroek Ishak MM.M.Si, Dr. Sukarwo, Dr. Hasan Limpo Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Sukarwo Gubernur Jawa Timur, Frans Lebu Raya Gubernur NTT dan lain-lain. Walaupun demikian tetap saja mereka setor uang dan janji untuk partai politik pengusung, tim sukses dan konstituen. Mereka juga tetap saja menghadapi gugatan namun langkahnya lebih mulus.

3. **Bagi pendatang baru**

Bagi pendatang baru sebagai calon jabatan politik akan lebih gampang dan pengeluaran lebih banyak karena belum tahu petanya. Mereka masih meraba-raba. Yang royal akan menghambur uang namun yang kikir akan penuh perhitungan. Namun demikian setoran uang kepada partai politik pengusung, tim sukses dan konstituen. Bagi yang sugih pasti memiliki *chance* yang lebih besar karena pendukung meminta uang sebagai kompensasi yang jumlahnya relative besar. Oleh karena ada calon yang gagal bisa gila karena hartanya habis dan hutang menumpuk karena membiayai pencalonannya. Jadi berhati-hatilah untuk maju sebagai pejabat politik.

4. **Pemula yang didukung rakyat**

Dalam pemilihan pejabat politik banyak kenyataan yaitu bahwa pemula yang berperilaku merakyat atau yang dapat mengambil hati rakyat mereka akan tampil sebagai pemenang. Sebagai contoh Jokowi Gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo yang Gubernur Jawa tengah, dan lain-lain.

5. **Mengakomodasi berbagai kepentingan**

Seorang politisi pasti mengakomodasi berbagai kepentingan yaitu :

- a. Mengakomodasi lembaga Negara dan badan pemerintah
Lembaga pemerintah itu harus diakomodir melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipakainya dasar tugas pokok dan fungsi seperti lembaga DPR, BPK, LSM, Kelompok profesi dan Komisi-komisi. Masing-masing memiliki hak kewajibannya masing-masing.
- b. Mengakomodasi Individu sesuai profesinya seperti :

- Politisi, ilmuwan, mahasiswa, buruh, petani dan kaum Duafa. Mereka harus diberi kesempatan berkontribusi dan mendapatkan manfaat.
- c. Mengakomodasi kegiatan pro rakyat
Kegiatan yang membuat rakyat sejahtera lahir batin, mengecap pendidikan dan menikmati hasil pembangunan
 - d. Mengakomodasi keimanan dan kemerdekaan

V. PENUTUP

Peranan politik terhadap pemerintah sangat tinggi oleh karena politik menentukan arah pemerintahan. Dari uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan dipengaruhi oleh perekrutan pejabat politik pada tataran legislatif yaitu melalui partai politik peserta pemilu dalam pemilu legislatif atau pileg.
2. Pemerintah dipengaruhi oleh pejabat politik melalui pemilihan presiden atau pilpres dimana calon presiden diajukan oleh satu partai politik atau lebih yang memiliki suara cukup sesuai undang-undang.
3. Pemerintah dipengaruhi juga oleh tindakan pejabat yudikatif dalam mengawal penegakan hukum.

B. Saran-saran

1. Agar rakyat memilih para wakil rakyat dengan cermat yaitu yang tidak terduga atau diduga melakukan kolusi, korupsi dan neptisme.
2. Agar Rakyat memilih presiden dengan cermat dengan memilih orang bersih dan pro rakyat sehingga ia dipilih bukan karena transaksional.
3. Penegakan hukum harus terus diupayakan dengan sanksi yang sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.

DAFTAR BACAAN

- Anderson James E., 1984, *Public Policy Making*, New York : Holt, Rinehart and Winston
- Apter, David E. *The Politics of Modernization*. Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Albro, Martin. 1989, *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta:
- Budiman, Arief. 1982 "Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan". *Prisma No. 7*. Jakarta: LP3ES.
- Colebatch, H., 1993, *Market, Bureaucracy and Community*, London : Pluto.
- Crouch, Harold. "The New Order: The Prospect for Political Stability" dalam Indonesia: *The Making of Nation*, ed. J.A.C. Mackie. Canberra: Research School of Pacific Studies. The Australian National University, 1980
- Dewey, John, 1953, *Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education*, New York : The Macmillan Company.
- Dimock and Dimock, 1969, *Public Administration*, New York : Rinehart and Co.
- Dunn, William, 1994, *Analisa Kebijakan*, Hanindita Offset, Yogyakarta
- , 1994, *Public Policy Analysis*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc
- Dye R. Thomas, 1972. *Politics, Economics, and Publics : Policy Outcomes in the Fifty state*, Rand-McNally, Chicago.

Dye R. Thomas , 1972, *Understanding Public Policy* ,Englewood Cliffs N.J : Prantice Hall .

De Grimm, Baron. *Correspondance, Litteraire, Philosophique et Critique*. 1753-1769, edisi1813, Vol. 4.

Dwight Y. King, "*Indonesia New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or aBureaucratic-authoritarian Regime: What Difference Does it Make?.Interpreting Indonesian Politics*, ed. Anderson dan Kahin.

Easton, D., 1953, *The Polical System* ,New York :Wiley

Easton, David ,1965 , A system Analysis of Political Life ,Wiley , New York

Easton, D., 1965, *A Framework for Political Analysis* ,Englewood Cliffs ,NJ:Prentice Hall.

Edwards, C. George, 1976, *Implementing Public Policy*, Washington : Texas A dan M University Congressional Quartely Press.

Kencana , Ibnu , 2005 , Perbandingan sistem Pemeerintahan di dunia , IPDN . Bandung.

Lembaga Admnistrasi Negara (1997) ,Makalah tentang Good Governance Jakarta .

Soenarto , 2005 ,Kebijakan Publik,Airlangga Press , Surabaya

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 joUndang-undang Nomor 32 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

